

KEMISKINAN KOTA VS KEMISKINAN DESA: PERBANDINGAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Grace Vania Bangun¹, Hendi Irawan²

Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur

Email: gracevaniabangun@gmail.com¹, hendiirawankesos@gmail.com²

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda antara kawasan perkotaan dan pedesaan, baik dari segi penyebab, bentuk, maupun respons kebijakan yang diperlukan. Artikel ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan pembangunan terhadap penanggulangan kemiskinan kota dan desa dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan desa lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap lahan produktif, infrastruktur, dan pendidikan, sementara kemiskinan kota lebih terkait dengan sektor informal, kepadatan penduduk, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang tajam. Kebijakan seperti Dana Desa terbukti berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pedesaan, sedangkan program penanggulangan kemiskinan kota menghadapi tantangan berupa kompleksitas sosial perkotaan yang lebih tinggi. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan tidak seragam antara wilayah kota dan desa.

Kata kunci

Dana Desa, Kemiskinan Kota, Kemiskinan Desa, Kebijakan Pembangunan, Kesenjangan Sosial.

ABSTRACT

*Poverty in Indonesia has distinct characteristics in urban and rural areas in terms of its causes, manifestations, and the policy responses required. This article aims to compare the impact of development policies on poverty alleviation in urban and rural areas using a literature review approach. The findings indicate that rural poverty is primarily influenced by limited access to productive land, infrastructure, and education, whereas urban poverty is more closely associated with the informal sector, high population density, and pronounced socio-economic inequality. Policies such as the Village Fund (*Dana Desa*) have been shown to contribute to reducing rural poverty rates, while urban poverty alleviation programs continue to face challenges due to the greater complexity of urban social conditions. This article recommends adopting more contextual and differentiated policy approaches that are tailored to the specific characteristics of urban and rural areas rather than implementing uniform development strategies.*

Keywords

Development Policy, Rural Poverty, Social Inequality, Urban Poverty, Village Fund.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat dipahami hanya dari sisi pendapatan semata, melainkan juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi sosial. Di Indonesia, kesenjangan pembangunan antara kota dan desa masih menjadi tantangan struktural yang berdampak pada pola dan intensitas kemiskinan di kedua wilayah tersebut. Migrasi penduduk desa ke kota yang terus berlangsung turut memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah menjadi salah satu pendorong utama persoalan kemiskinan, baik di titik asal maupun titik tujuan migrasi.

Pemerintah telah merancang berbagai instrumen kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari program berbasis desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa,

hingga program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang berfokus pada sektor informal dan permukiman kumuh. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut berbeda-beda tergantung pada karakteristik wilayah, sehingga penting untuk mengkaji secara komparatif bagaimana dampak kebijakan pembangunan terhadap kemiskinan di kota dibandingkan dengan di desa.

1. 1 Konsep dan Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Beberapa ahli menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan bahkan psikologis, sehingga pengukurannya tidak cukup hanya menggunakan garis kemiskinan berbasis pendapatan.

1. 2 Karakteristik Kemiskinan Desa

Kemiskinan di pedesaan umumnya berkaitan erat dengan sektor pertanian, keterbatasan kepemilikan lahan, rendahnya produktivitas, serta minimnya akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Faktor internal seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa turut berinteraksi dengan faktor eksternal berupa eksklusivitas struktur sosial dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga memperkuat siklus kemiskinan di wilayah pedesaan.

1. 3 Karakteristik Kemiskinan Kota

Berbeda dengan desa, kemiskinan kota lebih dekat dengan fenomena sektor informal, permukiman padat dan kumuh, serta pengangguran terselubung akibat arus urbanisasi yang tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja formal. Kemiskinan perkotaan juga cenderung memunculkan stratifikasi sosial-ekonomi baru yang memperburuk ketidaksetaraan di tengah kepadatan dan keragaman penduduk kota.

1. 4 Kebijakan Pembangunan sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia mengembangkan strategi pembangunan wilayah yang berbeda untuk kota dan desa. Untuk desa, kebijakan seperti Dana Desa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen fiskal utama, sementara untuk kota kebijakan lebih diarahkan pada penataan sektor informal, perbaikan permukiman, serta perluasan jaminan sosial. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu bersifat komprehensif, mencakup pemberdayaan masyarakat, penciptaan ekonomi produktif, dan penguatan nilai inklusivitas dalam pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan pembangunan wilayah tahun 2015–2025. Analisis dilakukan secara tematik dengan membandingkan temuan-temuan mengenai karakteristik kemiskinan dan dampak kebijakan di wilayah kota dan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan desa lebih banyak bersumber dari keterbatasan struktural, seperti akses lahan, modal, dan pendidikan, sedangkan kemiskinan kota lebih dipengaruhi oleh dinamika pasar kerja informal dan tekanan biaya hidup yang tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akar persoalan kemiskinan di kedua wilayah tidak dapat didekati dengan satu kebijakan yang sama

3.2 Dampak Kebijakan terhadap Kemiskinan Desa

Kebijakan Dana Desa terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota, terutama melalui pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi desa. Meskipun demikian, efektivitasnya masih bervariasi antarwilayah karena dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran.

3.3 Dampak Kebijakan terhadap Kemiskinan Kota

Program penanggulangan kemiskinan kota menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus berhadapan dengan keragaman aktivitas ekonomi informal serta migrasi penduduk yang terus-menerus. Kebijakan yang bersifat sektoral saja cenderung kurang efektif tanpa diikuti oleh penataan ruang kota dan perluasan akses pekerjaan formal.

3.4 Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

Perbandingan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang kontekstual: desa memerlukan penguatan basis ekonomi lokal dan infrastruktur, sementara kota memerlukan tata kelola sektor informal dan perluasan jaring pengaman sosial yang lebih adaptif terhadap dinamika perkotaan.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan kota dan desa memiliki karakteristik, penyebab, dan respons kebijakan yang berbeda. Kebijakan berbasis desa seperti Dana Desa relatif efektif menurunkan kemiskinan pedesaan, sementara penanggulangan kemiskinan kota membutuhkan strategi yang lebih terintegrasi antara penataan ruang, sektor informal, dan jaminan sosial. Diperlukan sinergi kebijakan pembangunan wilayah yang tidak menyeragamkan pendekatan antara kota dan desa agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). *Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan*.
Hafidh, A. A., Fikri, S., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu kajian struktur dan respons kebijakan*. Universitas Negeri Yogyakarta.
Hardianto. (2021). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275.
Hermawan, I. (2012). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 135–144.

- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3), 173–182.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Nalle, F. W., & Kiha, E. K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 35–45.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121–129.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi ke-7). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.